

**PERAN CHIANG MAI INITIATIVE MULTILATERALISATION  
(CMIM), ASEAN+3 MACROECONOMIC RESEARCH OFFICE (AMRO)  
DAN PASAR TUNGGAL BASIS PRODUKSI DALAM STRATEGI  
PEMBANGUNA EKONOMI MENUJU MASYARAKAT EKONOMI  
ASEAN ( MEA)**

Oleh :

Asfia Murni <sup>1)</sup>, Apriwandi<sup>1)</sup>

E-mail : asfia.murni@widyatama.ac.id

<sup>1)</sup>Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

**ABSTRACT**

*In 2015, the ASEAN economic community agreement or the ASEAN Free Trade came into force. Agreements that provide a challenge and requires Indonesia to improve in terms of investment, the main industrial sectors and the development of human resources is still inferior to other countries. However, it is not easily realized if the countries do not study in the form of funding for the study and to the MEA. For the role of AMRO and CMIM is needed in the process of free trade embodiment ASEAN countries besides his own government's role in upgrading the competitiveness of all sectors to face the MEA. This article reveals a picture, as well as the role of institutions tangatan AMRO and CMIM in terms of assessment and financing, as well as increased efforts to a single market and production base. Particularly in the economic field which is the goal of regional economic integration of ASEAN (ASEAN Vision 2020) in order to compete interstate and international scene.*

**Keywords :** AMRO, CMIM, a single market and production base.

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Visi ASEAN 2020 yang telah ditetapkan oleh para pemimpin ASEAN di Kuala Lumpur Desember 1997 yang memutuskan untuk mentranformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan agar semakin berkurang.

Kesepakatan yang dibangun oleh seluruh anggota ASEAN menggambarkan keseriusan seluruh negara-negara ASEAN dalam menghadapi krisis global yang mempunyai

dampak sangat besar terhadap pembangunan ekonomi makro. Berbagai upaya untuk menghadapi kesenjangan sosial budaya, keamanan dan kesulitan ekonomi telah banyak didirikan lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas ASEAN sebagai dampak keseriusan dalam mengimplementasikan Visi ASEAN 2020. Tujuan komunitas tersebut untuk mengintegrasikan ketiga elemen; ekonomi, sosial budaya dan keamanan sebagai pilar pencapaian kemakmuran dan tujuan bersama anggota ASEAN.

Implementasi Visi ASEAN 2020 perlu didukung oleh adanya Regional Financial Arrangements (RFAs) yaitu sebuah pengaturan dalam suatu kelompok negara yang berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan kepada anggotanya yang mengalami masalah neraca pembayaran, baik melalui pengumpulan kontribusi maupun cadangan devisa atau melalui mekanisme swap. Sebagai wujud implementasi Visi ASEAN 2020 negara-negara ASEAN+3 telah membuat RFAs dengan terbentuknya Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), yaitu suatu fasilitas dukungan likuiditas bagi negara-negara ASEAN+3 yang menghadapi masalah likuiditas jangka pendek atau kesulitan neraca pembayaran.

CMIM diharapkan akan memperkuat kemampuan regional untuk mempertahankan diri terhadap peningkatan risiko dan tantangan dari perekonomian global. Tujuan utama CMIM adalah untuk (1) mengatasi masalah neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan ASEAN+3 dan (2) melengkapi perjanjian keuangan internasional yang telah ada..(Virtuous Setyaka; 2011).

Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan program CMIM dibentuk AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office) yang berpusat di Singapura untuk memonitor dan menganalisis serta melakukan pendeteksian dini terhadap risiko keuangan di kawasan ASEAN+3 dan melakukan studi apabila negara anggota ASEAN +3 butuh dana pinjaman guna mengatasi penurunan cadangan devisa dalam jangka pendek. AMRO memberikan rekomendasi kepada otoritas keuangan di ASEAN+3 apabila ada negara anggota yang membutuhkan CMIM. Jumlah dana CMIM pooling fund yang merupakan pengelolaan mandiri (self-manage) dan berasal dari cadangan devisa di masing-masing negara semata-mata untuk mengatasi kebutuhan valuta asing jangka pendek negara anggota. Selanjutnya AMRO dan CMIM harus menegakan tiga pilar agar keuangan setiap negara bias bertahan dari tekanan aksispekulasi pelaku pasar uang global yang bias melemahkan nilai tukar mata uang negara-negara ASEAN. Menurut Virtuous Setyaka Pilar pertama adalah surveillance regional atau upaya pengawasan dan perhitungan risiko keuangan di kawasan dimana negara tersebut berada. Pilar kedua adalah bilateral swap arrangement (BSA) atau pertukaran cadangan devisa di antara dua negara yang saling bekerjasama. Pilar yang ketiga adalah pengembangan usaha-usaha yang mendukung sektor keuangan yang mampu mendukung pembangunan keuangan Negara tersebut. (Posted by MaGenTa on 18/04/2011).

Upaya-upaya implementasi Visi ASEAN 2020 sudah banyak, hal ini terlihat adanya inisiatif-inisiatif dalam hal pembangunan ekonomi inklusif untuk kawasan ASEAN dan kawasan luar ASEAN secara terbuka yang berorientasi pada pasar terbuka/bebas dan menjalankan sesuai dengan aturan-aturan multilateral antar kawasan sebagai bentuk komitmen ekonomi yang efektif. Pelaksanaan kegiatan ekonomi secara prioritas sebagai integrasi kawasan, memperkuat komunitas ekonomi antar negara, menggerakkan pelaku usaha,

menyiapkan tenaga terampil dan berbakat. Hal ini merupakan pencapaian ekonomi berdasarkan pasar tunggal dan basis produksi. Penguatan pasar tunggal dan basis produksi merupakan prioritas utama untuk melaksanakan langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi regional di kawasan ASEAN.

ASEAN menjalani proses pembangunan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 yang akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi. Dalam proses mewujudkan AEC ini, peningkatan daya saing pangan, pertanian dan produk kehutanan di pasar internasional, dan pemberdayaan petani melalui promosi koperasi pertanian telah menjadi prioritas regional. Isu-isu baru dan lintas sektoral seperti masalah ketahanan pangan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk sektor pertanian dan kehutanan, dan sanitary and phytosanitary (SPS) juga merupakan bagian dari prioritas. (Kementrian Perdagangan RI 2011).

Prioritas-prioritas yang harus dikembangkan secara terus menerus guna penguatan hubungan ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN+3 dan negara luar kawasan adalah memperkuat pasar tunggal dan basis produksi yang meliputi (1) aliran bebas barang, (2) aliran bebas jasa, (3) aliran bebas investasi, (4) aliran modal yang bebas, (5) aliran tenaga kerja terampil, (6) kerja sama bidang pangan, peranian dan kehutanan (Komunitas Ekonomi ASEAN, 2009). Keenam basis tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kegiatan ekspor-Import, pada giliran berikutnya akan mendukung sektor keuangan negara-negara ASEAN+3. Dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara dikawasan ASEAN.

## **Rumusan Masalah**

Lembaga ekonomi regional di bidang keuangan (CMIM dan AMRO) bertujuan untuk menguatkan kondisi ekonomi dikawasan ASEAN+3 dalam menghadapi perekonomian global. Upaya penguatan kondisi ekonomi kawasan ASEAN secara terintegrasi, bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan ekonomi di negara-negara ASEAN atau Luar ASEAN. Upaya tersebut dapat melalui inisiatif prioritas bersama untuk pembangunan ekonomi dalam bentuk pasar tunggal dan basis produksi. Permasalahan yang muncul dan akan menjadi fokus kajian dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana peranan dan gambaran perkembangan CIMM - AMRO dalam menguatkan ekonomi Asean+3 ?
2. Bagaimana strategi yang digagas oleh CIMM dan AMRO untuk meningkatkan pembangunan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ?
3. Bagaimana strategi dan perkembangan pasar tunggal dan basis produksi dalam pembangunan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ?
4. Apakah terdapat keterkaitan antara perkembangan pasar tunggal dan basis produksi dalam meningkatkan perekonomian suatu negara dan meminimalkan kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara di kawasan Asean+3?

## **Tujuan Kajian**

Tujuan yang diharapkan dari kajian ini adalah untuk:

1. Memahami peranan dan gambaran perkembangan CIMM - AMRO dalam perekonomian Asean+3.
2. Menemukan berbagai strategi yang dapat digunakan CIMM - AMRO untuk membangun kawasan ekonomi ASEAN yang komprehensif.
3. Memberikan gambaran perkembangan ekonomi melalui peningkatan pasar tunggal dan basis produksi di Indonesia.
4. Mengungkap masalah-masalah perkembangan pasar tunggal dan basis ekonomi dalam mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta kesenjangan ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN.

## PEMBAHASAN

Beberapa konsep teoritis yang berkaitan dengan kajian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

### **Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan dan menurunnya jumlah penduduk miskin. Amartya Sen (1999) menganggap GDP bukan merupakan tujuan utama pembangunan, tetapi memberikan makna pembangunan lebih luas yaitu kebebasan (freedom), kebebasan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan pekerjaan, kebebasan memilih dan menentukan kehidupannya (make choices and influence one's life), termasuk kebebasan untuk mendapatkan pendidikan (Mikkola, Anne, 2005:12).

Peningkatan kesejahteraan, peningkatan output adalah bagian dari proses pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi sebab pertumbuhan ekonomi meliputi peningkatan kapasitas perekonomian untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan penduduk. Dalam teori pertumbuhan dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada akumulasi dari asset ekonomi (termasuk manusia) dan imbal balik (return) dari penggunaan asset tersebut, pada gilirannya tergantung pada kemajuan teknologi dan efisiensi dimana asset tersebut dimanfaatkan dalam suatu kerangka kelembagaan produksi (the institutional frameworks of production).

Jadi pada dasarnya pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu akumulasi sumber daya produktif misalnya modal manusia, efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, dan kemajuan teknologi. Berdasarkan ketiga faktor tersebut dapat diperinci (breakdown) lebih lanjut berbagai indikator-indikator yang relevan sebagai penentu pertumbuhan ekonomi, diantaranya investasi, geografi, kebijakan pemerintah, inflasi, sistem keuangan, kemajuan teknologi dan modal manusia (Edwin dan Hussein, 2001:5).

Pertumbuhan ekonomi adalah syarat perlu (necessary condition) tetapi bukan syarat yang cukup (sufficient condition) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan sebagai necessary condition artinya bahwa seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk maka diperlukan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi, yang besarnya lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan

penduduk. Dengan kata lain peningkatan pendapatan suatu negara pada tahun ke  $n$  harus lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk pada tahun ke  $n$  pula. Pertumbuhan ekonomi dikatakan sebagai syarat yang cukup, artinya pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan distribusi pendapatan yang merata (equity), sehingga meningkatnya pendapatan suatu negara memberikan dampak pada meningkatnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di suatu negara.

Pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara sedang berkembang menyadari bahwa “pertumbuhan” (growth) tidak identik dengan “pembangunan” (development). Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Sedangkan Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi – institusi nasional, disamping tetap mengejar selaras pertumbuhan ekonomi. Todaro (2000) . Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita masyarakat. Dengan adanya pembangunan ekonomi, akan terjadi pertumbuhan ekonomi yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

### **Pertumbuhan Versus Distribusi Pendapatan.**

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya peningkatan Gross National Product (GNP) yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per capita dan meningkatnya standar hidup masyarakat. (Asfia, M: 2013) Dengan demikian kita tidak bisa melihat terjadi tidaknya pertumbuhan ekonomi hanya pada perkembangan nilai GNP saja, tapi harus juga melihat pada peningkatan standar hidup masyarakatnya, misalnya kemampuan daya belinya pada kebutuhan pokok, kemampuan memasuki jenjang pendidikan ketingkat yang lebih tinggi. Jika GNP naik tapi masih banyak terdapat orang yang menganggur disini bisa dipastikan pendistribusian pendapatan tidak merata. Terjadi ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat

Ketimpangan buruk bagi pertumbuhan suatu negara, karena kelompok miskin tidak dapat mengembangkan kemampuan mereka. Bilamana kelompok miskin tidak mampu untuk mengirimkan anak-anaknya ke sekolah yang lebih tinggi maka pertumbuhan akan terhambat akibat menurunnya akumulasi modal manusia (Todaro, 2000).

Di negara-negara miskin, perhatian utama terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting, namun hampir selalu sangat sulit diwujudkan secara bersama. Pengutamakan yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain (Todaro, 2000). Dinyatakan lebih lanjut bahwa pembangunan ekonomi meinsyaratkan GNP yang lebih tinggi, dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada awal pembangunan secara umum memang dapat dicapai, namun sering dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di perdesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan

struktural. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi. Oleh sebab itu lebih lanjut dinyatakan oleh (Asfia M, 2013) bahwa prinsip pemerataan dibidang pembangunan ekonomi sangat penting karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, tingkat kesejahteraan, distribusi pendapatan yang lebih merata.

Hubungan antara pertumbuhan dan pemerataan sering diperdebatkan, Simon Kuznets pada tahun 1955 menemukan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan digambarkan dalam kurva U yang terbalik, artinya jika pada awal pertumbuhan ekonomi pendapatan per kapita meningkat maka kesenjangan pendapatan akan meningkat. Setelah mencapai pendapatan tertentu baru ketimpangan pendapatan akan menurun. Pemicu utama terjadinya ketidakmerataan pendapatan adalah akibat dari perubahan struktural yang menyebabkan pergeseran penduduk miskin dan kurang produktif disektor tradisional ke arah sektor modern yang lebih produktif (Kakwani, Khandker dan Son, 2004:4). Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan penurunan dalam ketidakmerataan (inequity reduction) adalah determinan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang pro rakyat miskin atau disebut juga The pro-poor growth (Klasen, 2006:8).

Lebih lanjut dinyatakan oleh Todaro (2000) kini di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang mulai muncul himbuan dan tuntutan dari masyarakat luas yang semakin lama semakin kuat, bagi dilakukannya peninjauan kembali atas tradisi “pengutamaan GNP” sebagai sasaran kegiatan ekonomi yang utama. Kecenderungan ini mulai berlangsung sejak dekade 1970-an. Upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan pun mulai dikedepankan sebagai fokus utama pembangunan.

### **Integrasi Ekonomi di Kawasan ASEAN**

Definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi diantara dua atau lebih perekonomian suatu negara. Secara operasional, didefinisikan sebagai pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan penyatuan politik (kebijaksanaan) seperti, peraturan, dan prosedur. Instrumennya meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standardisasi produk, dan kebijaksanaan ekonomi. (M.Nukman Wijaya: 2012).

Integrasi ekonomi bertujuan memadukan pasar dan perekonomian negara-negara anggotanya secara bertahap. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu struktur organisasi yang bersifat supra-nasional, artinya semua Negara anggota diminta kesediaannya untuk melimpahkan sebagian kedaulatannya dalam pengambilan keputusan-keputusan oleh organisasi pusat yang kewenangannya cukup luas dan sangat mengikat semua negara anggotanya (Faisal Basri:1995).

ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, dimana terdapat 10 negara yang berintegrasi yaitu; Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar/Burma, Vietnam, Philipina, Laos, dan Singapura. Sedangkan ASEAN +3 artinya anggota ASEAN ditambah tiga negara yaitu, China Korea dan Jepang

Adanya keinginan negara-negara untuk bekerjasama atau berintegrasi dengan Negara lain khususnya dibidang ekonomi disebabkan integrasi tersebut banyak dampak positifnya

bagi perekonomian negara-negara anggota secara keseluruhan. Dampak positif tersebut menurut Ceccini (dalam Faisal Basri 1995) adalah:

1. Penurunan biaya-biaya sebagai akibat dari eksploitasi yang meningkat atas economies of scale dalam kegiatan produksi dan organisasi usaha.
2. Peningkatan efisiensi perusahaan, reorganisasi struktur industrial secara luas, biaya produksi akan bergerak turun karena adanya tekanan pasar yang lebih kompetitif.
3. Pola-pola baru persaingan antar industry secara keseluruhan dan relokasi sumber daya di pasar internal karena keunggulan komparatif benar-benar berperan dalam keberhasilan pasar.
4. Semakin meningkatnya inovasi, proses usaha dan produk baru yang ditimbulkan oleh dinamika pasar internal.

Dengan demikian integrasi ekonomi akan dapat menghasilkan out-put lebih banyak, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin cepat.

Menurut Viner ( dalam M.Nukman Wijaya: 2012) dampak dari suatu integrasi ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan dijelaskan melalui konsep trade creation dan trade diversion. Trade creation terjadi apabila suatu negara dapat mengimpor barang dengan harga yang lebih murah dari negara lain dalam suatu kawasan integrasi ekonomi, sehingga secara keseluruhan kesejahteraan akan meningkat. Sementara itu, trade diversion terjadi apabila impor dari suatu negara yang berada di luar kawasan digantikan oleh negara lain yang berada di dalam kawasan integrasi, karena produk dari negara lain dalam kawasan tersebut menjadi lebih murah akibat adanya perlakuan khusus dalam penetapan tarif.

Menurut Anggito Abimanyu (2011) Integrasi perekonomian dunia telah membawa manfaat besar dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Namun masing-masing negara rentan terhadap guncangan eksternal yang serius berarti masing-masing negara rentan terhadap guncangan eksternal yang serius, ditularkan baik melalui saluran ekonomi maupun keuangan.

Integrasi Moneter (P.M. Erza Killian). Asia Timur saat ini telah menjadi kawasan dan kekuatan moneter terbesar di dunia. Dengan masuknya Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang kedalam skema kerjasama ASEAN Plus Three, kawasan Asia Timur saat ini memiliki cadangan devisa terbesar di dunia, yaitu lebih dari USD 150 miliar. Bahkan, angka itu ditengarai sanggup menyaingi cadangan dana International Monetary Fund (IMF)

Melalui skema Chiang Mai Initiative and Multilateralization (CMIM) kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan Asian Macroeconomic and Research Office (AMRO) pada Maret 2010. AMRO menjalankan fungsi pengawasan (surveillance) yang nyaris menduplikasi fungsi IMF di kawasan Asia.

Kelahiran Asian Monetary Fund (AMF) yang diusung Jepang pada krisis 1998, tapi ditolak Amerika Serikat, sehingga kawasan Asia harus bergantung pada bantuan IMF. Dengan keterbatasan Amerika yang kini dilanda krisis, CMIM dan AMRO kemudian menjadi badan

yang identic dengan AMF, meskipun tidak serta-merta bias menggantikan fungsi IMF di kawasan Asia. Keberadaan CMIM dan AMRO masih banyak yang meragukan, oleh sebab itu kajian ke arah perkembangan kedua lembaga ini teruskan oleh Asia Development Bank, ASEAN, maupun akademisi di kawasan Asia Timur.

### **Pasar Tunggal dan Basis Produksi**

Berdasarkan blue print Komunitas Ekonomi ASEAN, ada empat hal Pertama adalah keinginan untuk segera adanya pasar tunggal ASEAN. Kedua, menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi. Ketiga, menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan yang merata, dan Keempat, menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi. (M. Nasih, Tabloid Diplomas 2011).

Pasar tunggal dapat diartikan sebagai bentuk pasar bersama yang terdapat dalam satu kawasan dan terdiri dari beberapa negara (misanya ASEAN+3), masing-masing negara dapat memasarkan produknya secara bebas atau tanpa hambatan ke negara-negara yang ada dalam kawasan tersebut.

Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA:2009) ingin mengembangkan Pasar tunggal dan basis produksi, melalui adanya kebebasan bergerak dalam hal: (1) aliran bebas barang, (2) aliran bebas jasa, (3) aliran bebas investasi, (4) aliran modal yang bebas, (5) aliran tenaga kerja terampil, (6) kerja sama bidang pangan, perikanan dan kehutanan, diantara negara-negara ASEAN+3.

Aliran bebas barang merupakan kebebasan masuknya barang ke negara-negara dalam kawasan ASEAN +3. Komponen aliran bebas barang tersebut meliputi: penurunan dan penghapusan tarif dan non tarif secara signifikan sesuai ketentuan AFTA (ASEAN Free Trade Area), Disamping itu perlu dibuat prosedur kepabeanan yang mudah melalui ASEAN Single Window, mengevaluasi dan melakukan harmonisasi standar dan kesesuaian.

Aliran bebas barang sebagai salah satu elemen pembentukan pasar tunggal dan basis produksi regional dikawasan ASEAN+3. Untuk terjadinya pergerakan arus barang secara komprehensif dan integratif diperlukan suatu perjanjian yang disepakat bersama dalam bentuk ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

Aliran Bebas Jasa merupakan kebebasan menawarkan dan meminta jasa diantara pelaku pasar di kawasan negara-negara ASEAN+3. Liberalisasi atau kebebasan jasa dilakukan dengan pengurangan atau penghapusan semua hambatan perdagangan jasa yang terkait pembukaan akses pasar. Hambatan dalam Akses pasar adalah pembatasan dalam jumlah penyedia jasa, volume transaksi, jumlah operator, jumlah tenaga kerja, bentuk hukum dan kepemilikan modal asing. Sedangkan hambatan nasional meliputi: peraturan yang dianggap diskriminatif, dalam persyaratan pajak, kewarganegaraan, perizina dan lain-lain.

Aliran bebas investasi merupakan kebebasan untuk berinvestasi di semua negara-negara dikawasan ASEAN+3. Kebebasan tersebut akan terujud jika semua hambatan dapat dihilangkan, Untuk menghilangkan hambatan perlu diterapkan: prinsip kesetaraan pemberlakuan terhadap semua PMA yang masuk ke wilayah suatu negara baik untuk hubungan bilateral maupun multilateral. Prinsip pemberlakuan host country yaitu pemberlakuan

yang sama antara PMA dengan PMDN dalam hal peraturan dan hukum yang berlaku di host country.

Untuk meningkatkan Investasi di kawasan ASEAN disepakati terdapat empat pilar yang harus ditegakkan yaitu dalam hal: 1) Perlindungan investasi, 2) Fasilitas dan kerja sama, 3) promosi dan awareness dan 4) liberalisasi.

Arus Modal Yang Lebih Bebas, artinya pengurangan (relaxing) atas restriksi-restriksi dalam arus modal misalnya relaxing on capital. Liberalisasi arus modal adalah menghilangkan peraturan yang bersifat menghambat arus modal dalam berbagai bentuk. Memperkuat pengembangan dan integrasi pasar modal di ASEAN. Arus Modal yang lebih bebas dapat mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, sebagai suatu sumber pembiayaan pembangunan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung perkembangan sektor keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil, dapat diartikan sebagai suatu kebebasan penduduk suatu negara untuk mendapatkan kesempatan kerja di luar negeri di kawasan ASEAN+3. Setiap warga negara dapat keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain mendapat pekerjaan tanpa ada hambatan pada negara yang dituju. Upaya kesepakatan yang dibuat untuk arus bebas tenaga kerja terampil dengan membuat Mutual Recognition Arrangement (MRA). Tujuan Kesepakatan tersebut adalah saling mengakui dan menerima segala aspek penilaian, seperti hasil tes atau sertifikasi. Menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mendapatkan kesetaraan dan kesamaan dalam berbagai persyaratan untuk memperoleh pekerjaan.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian pada bagian pembahasan dapat disimpulkan :

1. Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), berperan dalam memfasilitasi likuiditas bagi negara-negara ASEAN+3 yang menghadapi masalah likuiditas jangka pendek atau kesulitan neraca pembayaran.
2. CMIM akan memperkuat kemampuan regional untuk mempertahankan diri terhadap peningkatan risiko dan tantangan dari perekonomian global. Tujuan utama CMIM adalah untuk (1) mengatasi masalah neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan ASEAN+3 dan (2) melengkapi perjanjian keuangan internasional yang telah ada. (Virtuous Setyaka; 2011)
3. AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office) berperan memonitor dan menganalisis serta melakukan pendeteksian dini terhadap risiko keuangan di kawasan ASEAN+3 dan melakukan studi apabila negara anggota ASEAN +3 butuh dana pinjaman guna mengatasi penurunan cadangan devisa dalam jangka pendek. AMRO

memberikan rekomendasi kepada otoritas keuangan di ASEAN+3 apabila ada negara anggota yang membutuhkan CMIM.

4. Melalui *sma Chiang Mai Initiative and Multilateralization (CMIM)* kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan *Asian Macroeconomic and Research Office (AMRO)* pada Maret 2010. AMRO menjalankan fungsi pengawasan (*surveillance*) yang nyaris menduplikasi fungsi IMF di kawasan Asia.
5. Penguatan pasar tunggal dan basis produksi yang meliputi (1) aliran bebas barang, (2) aliran bebas jasa, (3) aliran bebas investasi, (4) aliran modal yang bebas, (5) aliran tenaga kerja terampil, (6) kerja sama bidang pangan, perikanan dan kehutanan (*Komunitas Ekonomi ASEAN, 2009*) menjadi basis penguatan hubungan ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN+3 dan negara luar kawasan. Keenam basis tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kegiatan ekspor-Import, pada giliran berikutnya akan mendukung sektor keuangan negara-negara ASEAN+3. Dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta terwujudnya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang lebih adil dan merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Anggito Abimanyu “Refleksi dan Gagasan kebijakan Fiskal” PT Gramedia, Jakarta 2011.
- Asfia, Murni, “Ekonomika Makro” Rafika Aditama Bandung (2013).
- Edwin dan Hussein, 2001. *Determinants of Economic Growth (Panel Data Approach)*. Economics Departemen Reserve Bank of Fiji.
- Departemen Perdagangan “Menuju ASEAN Economic Community 2015” Departemen Perdagangan RI
- Faisal Basri, “Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI” Erlangga 1995.
- Kemertian Perdagangan “Informasi Umum Masyarakat Ekonomi ASEAN” *ASEAN Community in Global Community of Nation*, Kemertian Perdagangan RI 2011.
- Komunitas Ekonomi ASEAN, 2009. *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN*. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN dan Departemen Luar Negeri RI.
- Klasen, 2006. *Pro Poor Growth and Gender: What can we learn from the Literature and OPPG Case Studies?*. KfW Bankengruppe. Frankfurt.

Mikkola, Anne, 2005. *Role of Gender Equality in Development – A Literature Review*. SSRN. University of Helsinki and HECER-Departemen of Economics. .

Muhammad Nukman Wijaya, “Analisis Kebijakan Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN Produk Elektronik terhadap Daya Saing Nasional”; Studi kasus Lampung Swaballast, F.E U.I 2012

M. Nasih, Dr.MT. Ak. “ Mencermati Pasar Tunggal ASEAN” Tabloid Diplomasi, edisi November 2011.

P.M. Erza Killian “ Menyoal Redenominasi Rupiah” August 7, 2010 · by [admin](#) · in [Artikel Opini](#)

Todaro dan Smith, “Pembangunan Ekonomi” Ed 9. Erlangga 2000.

Vitorus Setyaka, “Lebih Realistis Menilai Peran CMIM dan AMRO di Kawasan” Posted by [MaGenTa](#) on 18/04/2011